

Analisis *Political Commitment* Jokowi dalam Implementasikan “Revolusi Mental” dan “Nawa Cita” untuk menciptakan *power politic* di ASEAN.

Wilda Rasaili
Nur Inna Alfiah
Ach. Andiriyanto

The 6th President of Indonesia, Joko Widodo has a great idea in building a nation with "Mental Revolution". Mental revolution is how to create the human with integrity, hard work and a spirit of mutual cooperation. Mental revolution embodied by nine Jokowi's priority program "nawa cita" that initiated to show the priority of way to changes Indonesiatowards politically sovereign, self-reliant in the economic field, culture, law enforcement, security for all citizens and the unity of the Republic of Indonesia. The president's political commitment to implement the idea of a "mental revolution" and "nawa cita" was still weak. Thus evidenced by some form of slow implementation of the program in development, weaknessof law, slow eradication of corruption and drug dealers, Indonesian economy who still weak, unemployment and poverty, susceptibility of kidnapping of citizens in the border area. This commitment will affect the political power or soft power in international relations within ASEAN. Weak political Jokowi Commitment to the implementation of "mental revolution" and "nawa cita" also have an impact on the weakness of the political power of Indonesia in ASEAN.

Keyword: Jokowi's Political Commitment,mental revolution, Nawa Cita, politic power, Asean.

Presiden ke-6 Joko Widodo memiliki gagasan besar membangun bangsa berupa "revolusi mental". Revolusi mental adalah bagaimana membentuk manusia yang berintegritas, kerja keras dan semangat gotong royong. Revolusi mental di wujudkan dengan 9 (sembilan) program prioritas "nawa cita" Jokowi yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, penegakan hukum yang terpercaya, keamanan bagi seluruh warga dan kesatuan NKRI. Komitmen politik presiden dalam mengimplementasikan gagasan revolusi mental dan nawa cita ternyata masih lemah. Demikian dibuktikan dengan beberapa implementasi program berupa lambannya pembangunan di berbagai pesisir, lemahnya penegakan hukum, lambannya pemberantasan korupsi dan bandar narkoba, melemahnya ekonomi indonesia, banyaknya pengangguran dan angka kemiskinan, rawannya penculikan WNI di daerah perbatasan. Komitmen ini berpengaruh terhadap *power politik* atau *soft powerinternational relation* di lingkungan ASEAN. Lemahnya *political Commitment* Jokowi terhadap implementasi revolusi mental dan nawa cita juga berdampak pada lemahnya *power politik* Indonesia di ASEAN.

Kata kunci: *Political Commitment* Jokowi, revolusi mental, Nawa Cita, *power politic*, Asean

PENDAHULUAN

Dimasa pemerintahan Jokowi sebagai presiden RI ke-6, bangsa Indonesia berpotensi untuk menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Demikian diambil dari visi besar pemerintahan Jokowi untuk melakukan revolusi mental dan sembilan prioritas program kerja yang dimaksud Nawa Cita Jokowi yang digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, penegakan hukum yang terpercaya, keamanan bagi seluruh warga dan kesatuan NKRI.

Indonesia sudah memiliki modal potensi untuk menjadi negara besar, potensi-potensi tersebut berupa melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar se Asean yang hal demikian juga dapat mendongkrak terhadap pasar ekonomi Indonesia di Asean. Potensi-potensi Indonesia jika dikorelasikan dengan semangat pemerintahan di era Jokowi maka bukan hal yang mustahil bahwa Indonesia akan menjadi lebih sejahtera dan disungkani di dunia. Bangsa Indonesia merindukan perubahan menuju lebih baik, rakyat tidak tahan dengan kolonialisme modern berupa penjajahan ekonomi oleh pasar liberal dan kebebasan politik yang selalu tersandra oleh segelintir kepentingan elit. Rakyat tidak tahan dengan diskriminasi dan ketidakadilan hukum yang terus menggrogoti rakyat lemah, dan merasa muak dengan maraknya tindakan korupsi dan kesewenang-wenangan pemerintah.

Dibawah pemerintahan Jokowi ada revolusi besar sebagai langkah awal yang harus dilakukan menuju perbaikan bangsa ini, langkah itu berupa revolusi mental. Jokowi ingin memulihkan mental bangsa Indonesia yang telah terkontaminasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang berdampak pada menipisnya jati diri bangsa dan karakter kedirian sebagai bangsa Indonesia. menipisnya karakter bangsa indonesia berakibat pada maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja yang tidak baik, bobroknya birokrasi hingga keritak disiplin. Presiden Jokowi ingin menanamkan kembali orisinalitas kerakter bangsa Indonesia yang memiliki semangat kerja, berkepribadian luhur, berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah dan semangat gotong royong.

Melalui gagasan revolusi mental, presiden juga merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut “nawa cita” Jokowi. Sembilan program tersebut setidaknya ingin membangun bangsa indonesia yang memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kearifan budaya dan kepercayaan hukum.

Setiap pemerintahan selayaknya memang memiliki ide dan gagasan besar pembaharuan bangsa menuju lebih baik. Gagasan dan rencana program Jokowi tidak akan berarti jika hanya selesai di meja runding kerja. Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan bahkan kemunduran karena ketatnya persaingan global jika kometmen politik pemerintah lemah dalam realisasi programnya. Kometmen politik pemerintahan jokowi menjadi kunci langkah maju bangsa ini. Kometmen politik berkaitan dengan keseriusan presiden dalam

merealisasikan gagasan revolusi mental dan nawa cita. Semangat kerja pemerintah yang terdorong oleh kepentingan rakyat sangat dibutuhkan dalam perbuhana ini.

Komtemen politik pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan revolusi mental dan sembilan program prioritas tidak hanya berdampak pada perbagikan bangsa ini. Kometmen politik akan berimplikasi pada power politik Indonesia di Asean. Indonesia akan memiliki pengaruh besar baik dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya yang bisa dimainkan di kancah internasional terutama regional ASEAN. Ini yang diamanti dan terus dinantikan sejauhmana kometmen politik pemerintahan Jokowi dalam implementasi revolusi mental dan nawa cita untuk meningkatkan power politik Indonesia di Asean.

Revolusi Mental.

Istilah revolusi yang populer saat ini sebenarnya sudah lama di dengungkan oleh gerakan sosial-komunis di Eropa yang di pelopori oleh pemikiran Karl Marx. Marx menggunakan istilah revolusi dalam bukunya “eighteenth brumaire of louis bonaparte” yang diterbitkan tahun 1986. Menurut Marx, revolusi merupakan pembebasan manusia dari keterasingan dan penindasan, dan revolusi membutuhkan unsur *pasif*, dasar *material*, artinya revolusi tidak hanya dapat dimunculkan oleh aspek filsafat dan teori semata. Upaya revolusi tidak semata-mata didesak oleh pikiran, tetapi realitas yang harus mendesak pada pikiran atas pelaksanaan revolusi. Sehingga revolusi betul-betul lahir dari kondisi kondisi ketertindasan rakyat. Kalau rakyat betul-betul ditindas, dia tentu ingin berrevolusi, sedangkan apabila dia tidak mau berrevolusi kondisinya belum matang. Revolusi lahir dari ketertindasan rakyat

Revolusi juga mengarah sebuah gerakan perubahan untuk melepaskan dari belenggu dan dogma-dogma, baik belenggung dan kungkungan kekuasaan maupun dogma-dogma agama, revolusi adalah pembentukan “new politics” bagi gerakan dalam memelihara kebebasan dan demokrasi. Revolusi adalah gerakan perubahan mutlak dan fundamental. Ibarat sebuah rumah dimana situasi dan kondisinya sudah parah sehingga harus dirubah, dan perubahannya bukan hanya atap, teras maupun betonnya saja tetapi dirubah dasarnya, karena pondasi dasar sudah keropos dan berpotensi roboh, ini lah revolusi. Sebuah perubahan besar untuk menuju pada kehidupan yang dianggap lebih baik. Konsep revolusi Marx sangat fundamental, pada akhirnya kehidupan yang baik sebagaimana dimaksudkan Marx adalah kehidupan masyarakat tanpa kelas penguasa. Marx mengkritik revolusi Prancis, revolusi memang membebaskan seluruh rakyat perancis dari penghisapan kaum feodal, akan tetapi revolusi itu bagi Marx belum radikal. Revolusi Prancis hanya melahirkan struktur-struktur kekuasaan baru dimana borjuis menjadi kelas berkuasa yang baru.

Sedangkan revolusi mental adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap pola pikir, ide, sikap dan gagasan bangsa untuk tidak hanyan pada belenggu-belenggu agama, kekuasaan dan peradaban. Revolusi mental di indonesia mulai diperkenalkan oleh tokoh PKI ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit, yang mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Perubahan nama

itu karena alasan revolusi mental. Aidit tidak menginginkan nama “Ahmad” membelenggu dirinya pada dogma Islam yang akhirnya menghambat gerakan perubahan.

Revolusi Mental Jokowi

Diluar aspek ideologis, revolusi mental adalah perubahan *mindset* bangsa ini yang cenderung pragmatis dan terbelenggu pada kemalasan untuk melakukan perbaikan bangsa Indonesia. Istilah revolusi mental yang dimaksud Jokowi sebagaimana disampaikan dalam *workshop* di Kompas adalah bagaimana mengembalikan karakter orisinel bangsa yang mulai terkikis. Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya membuat rakyat sejahtera. Menipisnya karakter bangsa berpotensi pada korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidak disiplin. Sehingga Jokowi menawarkan revolusi mental untuk menuju Indonesia hebat sebagaimana dicita-citakan dalam masa kampanye Jokowi.

Terminologi “revolusi” Jokowi berbeda dengan revolusi pada masa penjajahan, revolusi mental bukan sebuah gerakan radikal pemikiran untuk perang melawan penjajah. Revolusi mental tidak berkaitan dengan gerakan pemberontakan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa, tetapi revolusi mental mengarahkan pada refleksi tajam karakter bangsa yang asli. Revolusi mental ala Jokowi mendorong semangat kerja memabangun bangsa yang tidak terkontaminasi dengan perkembangan global dan teknologi. Menjadi negara dan bangsa yang kuat dan hebat bukan berarti meniru yang lain, tetapi menjaga identitas dan karakter bangsa sendiri.

Salah satu jalan untuk revolusi mental Jokowi adalah dengan cara membentuk pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Perubahan mental rakyat harus dimulai dari penanaman pendidikan yang berkualitas dan berkarakter kedirian bangsa Indonesia.

Nawa Cita Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi memiliki visi Terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam 7 (tujuh) misi untuk mewujudkan visi. Misi tersebut diantaranya meliputi; perwujudan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Unuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan Jokowi dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan maka pemerintah juga merumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu yang disebut Nawa Cita, diantaranya adalah:

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education).
9. Kami akan mempertegus Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Melihat dan mengkaji sembilan Nawa Cita pemerintahan Jokowi secara garis besar berpotensi untuk membangun Indonesia hebat dikancah internasional serta sejahtera dalam situasi nasional. Melalui Nawa Cita semua aspek kepentingan nasional dan masalah-masalah sosial tersentuh untuk menjadi agenda prioritas seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, pelayanan publik yang kesemuanya orientasi pada mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Nawa cita Jokowi juga mengamankan pada peran dan kontribusi Indonesia dalam membangun perdamaian dan demokrasi dunia. Politik luar negeri bebas-aktif menjadi pedoman sikap politik luar negeri Indonesia. Selain itu amanah UUD 1945 agar Indonesia berperan untuk menjaga perdamaian dunia. Perhatian dalam Nawa Cita ini pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam di kancah internasional dalam upaya mendukung ketertiban dan keamanan dunia, serta prinsip-prinsip demokrasi serta keberadaban hubungan Internasional. Tidak ada sekala prioritas dalam menjaga perdamaian dunia, tetapi utama Indonesia harus menjaga peran strategis dan pengaruhnya di wilayah regional ASEAN. Indonesia

memiliki sejarah yang berarti dalam pendirian ASEAN dan pengaruhnya dalam setiap konsolidasi di tingkat ASEAN.

Benang merah yang dapat diketengahkan dalam agenda prioritas pemerintahan Jokowi yaitu tinggal bagaimana melihat komitmen pemerintah dalam realisasinya. Komparasi revolusi mental dengan nawa cita menjadi harapan besar rakyat Indonesia untuk melihat kejayaan dan kesejahteraan rakyat. Jika komitmen politik pemerintah tinggi terhadap janji-janjinya maka bukan hal yang mustahil bangsa ini akan disungkani bahkan di Dunia. Tetapi persoalannya terkadang visi, rumusan dan agenda-agenda ideal tersebut hanya selesai di mija kabinet serta di wacana-cawana publik yang realitasnya jauh panggang dari api. Sehingga bukan mustahil pula bangsa ini akan semakin menderita dan menjadi bulan-bulan bangsa lain penjajahan ekonomi, budaya dan politiknya. Pada akhirnya kedaulatan Indonesia ada ditangan asing.

Political Commitment pemerintahan Jokowi

Sepuluh perjalanan pemerintahan Jokowi dalam kabinet kerja ini kemudian mengajak bangsa untuk melihat sejauhmana Jokowi membawa pemerintahan dalam merealisasikan visi besar revolusi mental dan program prioritas yang dinamakan Nawa Cita. Realisasi visi revolusi mental dalam wujud pembangunan nasional lebih baik atau indonesia menjadi hebat sebagai tesis kometmen politik Jokowi terhadap masyarakat. Pemerintahan Jokowi perlu menunjukkan bahwa gagasan revolusi mental tidak hanya menjadi strategi politik pemenangan saat pilpres saja yang pada akhirnya kehilangan momentum setelah menjadi presiden.

Kometmen politik Jokowi secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, reformasi birokrasi, keamanan warga negara, kedaulatan politik, kemajuan dan kemandirian dalam bidang ekonomi, pengelolaan daerah melalui pinggiran, penegaan hukum sampai memutus rantai perdagangan narkoba.

Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka menunjukkan kometmen politik Jokowi terhadap revolusi mental dan agenda prioritas, Jokowi berjanji untuk melakukan revormasi kabinet dengan cara profesional dan proporsional. Gagasan koalisi tanpa syarat bagi parpol yang mendukung merupakan kometmen politik jokowi dalam menejemen perubahan birokrasi yang dalam pemerintahan sebelumnya hampir mustahil terjadi. tetapi persoalannya koalisi tanpa syarat pada akhirnya hanya penghianatan politik terhadap rakyat yang mendukung. Rakyat kecewa ketika komposisi kabinet masih banyak di isi oleh orang-orang yang berlatar partai politik. Dari 34 jumlah kementrian, sebanyak 18 orang berlatar belakang profesional non-partai dan 16 orang berlatar belakang partai politik. kebingunan rakyat semakin tinggi knetika Jaksa Agung sebagai lembga tinggi penegak hukum di isi oleh H.M Prasetyo dari partai Nasdem, dalam perjalannya Prasetyo memiliki kinerja terburuk dari sepuluh kementrian lainnya.

Reformasi birokrasi terus dilakukan untuk menemukan komposisi terbaik dalam kinerja dan kepuasan rakyat. Kurang dari satu tahun kabinet kerja, Presiden Jokowi melakukan reshuffle pertama yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja. Perombakan posisi tersebut diantaranya, menteri kordinator (menko) Perekonomian diisi Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil, Menko Politik Hukum dan Kemanan Luhut Binsar Panjaitan Tedjo Edhi Purdijanto, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menggantikan Indriyono Susilo, Menteri Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menggantikan Rahmat Gobel, Menteri Bappenas/PPN Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto. Masuknya Rizal Ramli, Darmin Nasution dan Thomas Limbung setidaknya menjadi bukti komitmen politik Jokowi untuk memperbaiki birokrasi dan mencari orang-orang yang punya kredibilitas dibidangnya. Ketua ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Probo Sujono, mengatakan tiga menteri baru dianggap sebagai pakek menjanjikan.

Memberikan kinerja kepuasan mentri terus dilakukan, dalam reshuffle ke dua kembali ingin memperlihatkan sejauh mana komitmen politik dalam perbaikan birokrasi. Masuknya nama Sri Mulyani Indrawati dan Wiranto menunjukkan keseriusan Jokowi dalam memperbaiki dinamika ekonomi yang tidak stabil serta kondisi politik dan keamanan yang menjadi ancaman rakyat, walaupun disisi lain terdapat beberapa nama mentri baru sebagai komitmen politik terhadap parpol yang mendukung seperti Golkar dan PAN. Posisi mentri Puan Maharani juga menjadi sorotan komitmen Jokowi melihat lemahnya prestasi dan kinerja dari mentri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut wartawan Senior Mega Simarmata, Kinerja Puan dalam kementriannya sangat buruk, kepercayaan rakyat sangat rendah dibandingkan mentri-mentri lainnya. terlepas dari aspek kinerja puan dan representatif partai Jokowi telah menunjukkan komitmen politik dalam birokrasi kabinet kerja.

Menjaga keamanan warga negara.

Dalam aspek keamanan warga negara Indonesia di luar negeri atau tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai devisa negara yang harus dilindungi. Indonesia melakukan terobosan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, kualitas TKI serta mekanisme pemberangkatan. Pemerintah memperbaiki TKI yang bermasalah dan tidak legal karena berpotensi mendapat perlakuan kasar di negeri orang. Kebijakan itu berupa pemulangan terhadap TKI yang bermasalah. Sampai pada 24 Desember 2015 pemerintah telah berhasil memulangkan 703 orang tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dari total 1428 orang. Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), mengatakan pemerintah sangat serius menyelesaikan permasalahan TKI. Pemerintah ingin mencegah TKI ilegal dan menempatkan TKI yang sudah memiliki aturan dan perlindungan bagi buruh migran atau perjanjian pemerintah Indonesia. Pemerintah juga berupaya menindak tegas penyalur jasa TKI yang nakal, perbaikan kualitas Balai Latihan Kerja dan lembaga sertifikasi dapat

mengurangi ancaman terhadap TKI. Selain respon cepat pemerintah terhadap perbaikan dan perlindungan TKI, kasus eksekusi mati dua TKI di Arab Saudi yang terjadi pada April 2015 menjadi kritikan langkah cepat Jokowi. Pemerintah terkesan lamban menyikapi langkah eksekusi mati TKI di Arab Saudi. Jokowi kurang merespon dalam menyikapi soal eksekusi mati TKI, kata Margarito Kamis, pakar HTN. Secara berturut-turut dalam waktu 2 hari saja, dua TKW Ri di hukum mati oleh pemerintah Arab Saudi. Siti Zaenab asal bangkalan di eksekusi mati pada Selasa 14 April 2015. Karni binti Medi Tarisal, Brebes JaTeng, di eksekusi pada Kamis 16 April 2015. Pemerintah Jokowi terlambat melakukan lobi dan fungsi diplomasi Kemenlu tidak bisa diandalkan. Margarito. Setidaknya dengan persoalan dan keberhasilan pemerintah memberikan komitmen membenah kualitas dan keamanan bagi TKI.

Perlindungan pemerintah terhadap keamanan rakyat juga ditunjukkan pada proses rekonsiliasi untuk menyelamatkan warga Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Indonesia tidak hanya berdiplomasi dalam pembebasan, pemerintah sempat melakukan tekanan baik bagi pemerintah Filipina maupun kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan serangan militer. Melalui Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Joshua Mamoto, Indonesia sudah merencanakan dan menyiapkan serangan militer dalam pembebasan sadara. Pemerintah terus memantau segala perkembangan terkait dengan kondisi sandera, yang dibuktikan dengan intensitas hubungan dan komunikasi Kemenlu dan Kemenkumham. Terlepas dari jangka waktu yang cukup lama dalam pembebasan sadara, pemerintah telah menunjukkan komitmen pembebasan warga negara yang diancam oleh kelompok-kelompok ekstrim.

Selain menjaga keamanan rakyat secara langsung, pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap lembaga keamanan dan pertahanan. Kekuatan militer di era pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan di rating dunia. Kekuatan militer di tahun 2014-2015 naik ke peringkat 12 yang sebelumnya berada di urutan 19 pada tahun 2014, urutan ke-22 di tahun 2013-2014. Penilaian peringkat militer dinilai dari banyaknya alutsista yang dimiliki, cadangan energi, modernisasi, kesehatan ekonomi, kemampuan Naval (AL) yang mempunyai. Peningkatan rating militer di dunia berpengaruh pada ancaman keamanan baik dari luar maupun dari dalam. Tidak dapat dibayangkan andaikata rating militer Indonesia berada di peringkat 50 keatas maka negara-negara lain tidak akan sungkan terhadap Indonesia. Indonesia akan menjadi bahan olok-olok gertakan keamanan.

Kedaulatan Politik

Komitmen politik Jokowi dalam menjaga kedaulatan politik dilakukan dalam bentuk menciptakan pemilu yang demokratis, efektif dan efisien. Di pemerintahan Jokowi sistem pemilu menjadi parameter kualitas demokrasi secara formal di Indonesia. Indonesia menjadi mercusuar demokrasi dunia setelah AS dalam bidang pemilu.

Beberapa aturan tentang KPU dibuat guna untuk menjaga kualitas pemilu yang memiliki kedaulatan politik. adanta PKPU No 1 dan 2 tentang pelayanan dan jadwal mengindikasikan kepada efektifitas dalam pelaksanaan pemilu. Pemerintah bersama KPU dapat melaksanakan pilkada serentak dari tingkat desa, kabuten sampai provensi yang akan dilakukan tahun 2017 mendatang. Walaupun pelaksanaan pemilu serentak masih dalam proses perbaikan karena penyesuaian masa priode, tetapi pilkada serentak pertama yang berjalan efektif efesian merupakan terobosan baru membangun dinamisasi politik bangsa ini.

Kesenjangan yang ada ditiap daerah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini didasarkan pada fakta pembangunan yang lebih memprioritaskan Jawa, Sumatera dan Bali menimbulkan kesenjangan lebar antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia. Indikator yang menggambarkan adanya kesenjangan tadi. Misalnya pembangunan yang masih terkonsentrasi di wilayah padat penduduk, seperti Jawa, Sumatera dan Bali. Bahkan data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2014 menunjukkan hampir 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dihasilkan dari Pulau Jawa, 20 persen dari Pulau Sumatra, dan sisanya dihasilkan dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Disisi lain, kebijakan pemerintah terkait dengan pembagian dana alokasi umum terlalu bias kepada variabel jumlah penduduk. Akibatnya, daerah yang memiliki wilayah luas dengan penduduk yang lebih sedikit dari Pulau Jawa akan mendapat dana transfer yang kecil. Sementara daerah dengan wilayah yang sangat luas karena jumlah penduduknya sedikit mendapatkan transfer dana yang sedikit pula. Sehingga diperlukan sebuah strategi dan orientasi kebijakan baru, pemerintahan jokowi menerapkan kebijakan desentralisai asimetris dan pengkajian ulang tata kelola keuangan pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi asimitris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi, serta membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan mengatur kembali sistem distribusi keuangan nasional diharapkan proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Distribusi keuangan salah satunya dengan memberikan Dana Desa langsung dari APBN. Jumlah Dana Desa tahun ini mencapai Rp47 triliun sehingga masing-masing desa akan mengelola dana secara mandiri sebesar Rp500-800 juta per desa. Selain Dana Desa, setiap desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Daerah (Dana Bagi Hasil/DBH) dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Dana Alokasi Umum/DAU) yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Disamping itu pemerintah mengawal ketat tiap retribusi keuangan dana desa dengan menggandeng sejumlah instansi, seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang mempunyai tugas dan fungsi di sektor jasa keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta pihak perbankan.

Kwalitas Pendidikan

Maju dan berkembangnya suatu Bangsa bergantung pada generasi muda yang ada di dalam negara tersebut. Hal ini dapat diukur ketika seluruh tiap generasi muda dan warga negara di suatu negara memperoleh pendidikan, maka secara tidak langsung negara tersebut dapat dikategorikan dalam negara maju dan berkembang. Akan tetapi pendidikan sendiri masih dihadapkan pada berbagai masalah yang menjadi hambatan dalam proses pendidikan.

Untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah mengeluarkan program indonesia pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Penyehatan Ruang Fiskal

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM sempat di protes keras oleh sejumlah kalangan dan ditolak oleh mayoritas publik. Isu kuatnya kepentingan politik dan keuntungan untuk perusahaan asing dibalik pencabutan subsidi menjadi modal rakyat untuk menolak kebijakan yang dianggap menyentuh langsung terhadap penderitaan rakyat. Kenaikan harga BBM pastinya akan berimplikasi pada kenaikan harga bahan pokok masyarakat yang tidak diimping dengan kenaikan harga pasar hasil pertanian rakyat.

Keberanian pemerintah dalam menaikkan harga BBM ternyata berimplikasi pada penyehatan ruang fiskal yang begitu luas, dari anggaran subsidi yang semula pada APBN 2014 sekitar Rp 276 triliun kini berkurang Rp triliun pada APBN-P 2015. Dari hasil pencabutan subsidi BBM ada kenaikan anggaran pembangun nasional baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Kementerian Pekerjaan umum mendapatkan tambahan anggaran Rp 33 triliun, kementerian Perhubungan Rp 20 triliun, kemudian belanja infrastruktur pemerintah meningkat Rp 100 triliun.

Sebagaimana komitmen pemerintah dalam pembangunan daerah pesisir, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun untuk 73.000 yang digarap bersama-sama oleh kementerian dalam negeri dan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Masing-masing desa kisaran mendapatkan kucuran dana sebesar 1 miliar sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk.

Transparansi

Diera pemerintahan Jokowi, transparansi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan memiliki komitmen kuat. Transparansi merupakan langkah efektif mencegah tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Transparansi juga mendorong semangat kinerja pemerintah karena ruang kerja dan pengelolaan pemerintah dapat diketahui oleh publik. Selain transparansi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen membenahi birokrasi dengan cara melakukan transparansi.

Semangat transparansi pemerintah dikatakan oleh kata Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Abdul Rahman Ma'mun, bahwa Pemerintahan baru punya semangat transparan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu website pemerintahan yang dikelola Kementerian dan Lembaga harus mencerminkan keterbukaan baik menyangkut informasi kinerja maupun anggaran. transparansi dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu cara yang efektif dalam menekan angka korupsi. Misalnya, menyampaikan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Keuangan melalui website. "Kalau ketiganya diumumkan, masyarakat dapat berpartisipasi turut mengawasi penggunaannya.

Upaya melakukan transparansi negara juga dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang menjadi leading sector Open Government Indonesia (OGI). Beberapa kriteria transparansi pengelolaan negara setidaknya meliputi ketersediaan profil, kinerja, laporan keuangan, informasi berdasarkan perundangan dan regulasi yang terdapat pada situs kementerian dan lembaga. Idealnya situs kementerian melalui website memberikan lima informasi sebagaimana digambarkan pada kriteria di atas.

Pemerintah juga telah meluncurkan sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN ini adalah cash management system yang diterapkan pemerintah pusat dan mempermudah mengontrol pengelolaan keuangan negara. SPAN merupakan suatu milestone transformasi pengelolaan keuangan negara. tujuan utama dari SPAN adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara. SPAN juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu mengenai posisi keuangan pemerintah pusat sehingga memudahkan pengambilan keputusan manajemen keuangan pemerintah.

Transparansi pengelolaan negara sebagai langkah untuk mencegah maraknya korupsi. Sistem birokrasi yang transparan salah satu contohnya adalah pemerintah membuat sistem pajak online, *e-budgeting*, dan *e-purchasing*. Komitmen Jokowi berupa penekanan terhadap seluruh pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun walikota untuk membuat *one stop service office* atau pelayanan satu atap dan *budgeting* untuk mengontrol agar tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan. Komitmen transparansi ini sebagai upaya untuk menegakkan maraknya tindakan korupsi di lingkungan birokrasi.

Power Politik Indonesia di ASEAN

Dinamika perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, menjadi determinan pengaruh suatu negara di lingkungan regional Internasional. Wilayah regional Asean akan terus dapat dimainkan oleh di indonesia, ketika pemerintah Indonesia dapat menjaga stabilitas nasional dari berbagai aspek, ekonomi, politik, hukum dan keamanan. Dan aspek aspek nasional seperti ekonomi, militer dan politik menjadi determinan atau model politik luar negeri RI untuk memainkan peranannya dikancah regional dan internasional.

Banyaknya investasi asing, pariwisata asing juga menandai bahwa indonesia memiliki cukup pengaruh di bidang kemandirina ekonomi. Penindakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pengedar narkoba sebagai bukti kedaulatan hukum nasional. Dengan hukum yang tidak pandang bulu membuktikan power indonesia di asean bahkan dunia. Indonesia tidak bisa di intervensi oleh negara lain dalam menegakkan hukum yang adil, dan negara-negara lain tidak melakukan tekanan atau koperatif sebagai bukti ada pengaruh besar indonesia di ASEAN.

Kesimpulan

Pemerintahan Jokowi memiliki kometmen politik dalam implementasi revolusi mental dan nawa cita tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan waktu pemerintahan yang baru berjalan. Dibidang reformasi birokrasi Jokowi telah menunjukkan keseriusan dalam membenahi lembaga kementrian yang kinerjanya masih lemah. Asppek ekonomi yang cendrung fluktuatif awal pemerintahan menjadi catatan pembenahan yang terus dilakukan. Pemulihan ekonomi saat ini setidaknya membuktikan kometmen pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi. Kedaulatan politik dibuktikan dengan stabilitas politik yang terjadi, sistem pemilu serentak dan demokrasi yang mendorong partisipasi serta kegaduhan di lembaga parlemen sedikit menunjukkan ada kedaulatan politik dibangsa ini.

Daftar Pustaka

Franz magnis Suseno, 2010. *“Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peter L Berger and Richard John Neuhaus, 1970., *“ Movement and revolution, on American Radicalism”*. United States of Amirica, hal.

Habib Alatas, <http://www.rmola.co/read/2014/06/27/161329/Istilah-Revolusi-Mental-Jokowi-Sudah-Lama-Dipakai-Komunis-untuk-Mendobrak-Ajaran-Agama->

William D. Coplin., 2003., *“ Pengantar Politik Internasional, suatu telaah teoritis”*. Bandung: Sinar baru Algasindo, hal.165-172

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental.>

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian: Visi, Misi dan program aksi”. Jakarta, 2014 hal 6.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/19432531/Jatah.16.Menteri.Asal.Par.pol.Uslan.Jokowi>

<http://poskotanews.com/2015/11/16/susunan-10-menteri-terbaik-dan-10-terburuk/>

<http://kmfh.hukum.ugm.ac.id/2015/10/06/1076/>

<https://www.intelijen.co.id/mega-puan-tak-tahu-diri-kinerjanya-terburuk-dibanding-menteri-lain/>

<http://www.voaindonesia.com/a/pemerintahan-jokowi-lakukan-terobosan-selesaikan-masalah-tki/2573013.html>

<http://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136226/jokowi-tak-seperti-sby-tangani-tki-dieksekusi-mati>

<http://m.okezone.com/read/2015/04/18/337/11/jokowi-tak-seperti-sby-tangani-tki-dieksekusi-mati>.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/15/078796099/wni-jadi-sandera-kivlanzen-abu-sayyaf-sudah-terkepung>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/12/22472471/.operasi.militer.pembebasan.sandera.jangan.dipublikasi>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/01/078792376/pembebasan-sandera-abu-sayyaf-wiranto-biarkan-saya-bekerja>

<http://www.konsorsium.or.id/2015/09/jokowi-mampu-bawa-kekuatan-militer.html>

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/8776/Peraturan-Pelaksana-Pilkada-Serentak-2015-2017-2018>

Taufick Rahman, Membangun Dari Pinggiran,

<http://www.babakbaru.id/2015/07/membangun-dari-pinggiran.html>

<http://kemendes.go.id/view/detil/1662/menteri-marwan-ajak-ojk-kawal-pembangunan-ekonomi-desa>

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>

<http://nasional.sindonews.com/read959747/161/mengawal-komitmen-politik-pemerintah>.

<http://news.detik.com/berita/2708958/website-pemerintah-harus-lebih-transparan-di-era-jokowi-jk>

<http://news.detik.com/berita/2708958/website-pemerintah-harus-lebih-transparan-di-era-jokowi-jk>

<http://economy.okezone.com/read/2015/04/29/20/1141956/menkeu-era-jokowi-lebih-transparan-kelola-keuangan-negara>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141210_korupsi